

**Implementasi Peraturan Walikota Samarinda  
Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan  
Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di  
Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang  
Kota Samarinda  
(Studi Koordinasi Wilayah Pokmas II)**

---

**Muhammad Wendy<sup>1</sup>, Muhammad Habibi<sup>2</sup>, Ahmad Yani<sup>3</sup>, Abdul Rofik<sup>4</sup>**

Muhammad Wendy, [muhwendy@gmail.com](mailto:muhwendy@gmail.com), Universitas Widya Gama Mahakam

Muhammad Habibi, [habibi@uwgm.ac.id](mailto:habibi@uwgm.ac.id), Universitas Widya Gama Mahakam<sup>2</sup>

Ahmad Yani, [ahmadyani@uwgm.ac.id](mailto:ahmadyani@uwgm.ac.id), Universitas Widya Gama Mahakam<sup>3</sup>

Abdul Rofik, [abdulrofik@uwgm.ac.id](mailto:abdulrofik@uwgm.ac.id), Universitas Widya Gama Mahakam<sup>4</sup>

---

**Abstract**

The Community Development and Empowerment Program (PROBEBAYA) is one of the policies of the Samarinda City Government that aims to improve environmental development and community empowerment based on Neighborhood Units (RT). The implementation of this program is expected to encourage community participation in development and improve community welfare in a sustainable manner. However, in its implementation, various obstacles are still found, such as suboptimal communication between program implementers, limited human resources, and not maximum involvement of the community and related institutions. This study aims to describe the implementation of Samarinda Mayor Regulation Number 4 of 2023 concerning Technical Guidelines for the Implementation of the Community Development and Empowerment Program (PROBEBAYA) in Teluk Lerong Ulu Village, Sungai Kunjang District, Samarinda City, as well as identify supporting and inhibiting factors for its implementation. The research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The research analysis uses Edward III's policy implementation model which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study show that the implementation of PROBEBAYA in Teluk Lerong Ulu Village has gone quite well. Communication between program implementers has been carried out through socialization and coordination, the available resources are sufficient to support the implementation of the program, the disposition of the implementers shows good commitment, and the bureaucratic structure has run according to their respective duties and functions. Supporting factors include local government support, program funding, and community participation, while inhibiting factors include limited human resource capacity, limited reporting time, and suboptimal coordination between related parties.

**Keywords:** Policy Implementation; PROBEBAYA; Community Empowerment;

---


**Abstrak**

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kota Samarinda yang bertujuan meningkatkan pembangunan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Tetangga (RT). Implementasi program ini diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti kurang optimalnya komunikasi antar pelaksana program, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum maksimalnya keterlibatan masyarakat dan lembaga terkait. Penelitian ini bertujuan untuk

mendeskripsikan implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PROBEBAYA di Kelurahan Teluk Lerong Ulu telah berjalan cukup baik. Komunikasi antar pelaksana program telah dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi, sumber daya yang tersedia cukup mendukung pelaksanaan program, disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang baik, serta struktur birokrasi telah berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah daerah, pendanaan program, dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, waktu penyusunan laporan yang terbatas, dan belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan; PROBEBAYA; Pemberdayaan Masyarakat;

---

<b>Received</b>	:	02 Febuari 2026
<b>Accepted</b>	:	17 Maret 2026
<b>Published</b>	:	25 Mei 2026
<b>Copyright Notice</b>	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

## **1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan daerah pada era otonomi daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Samarinda menginisiasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) sebagai salah satu program unggulan yang bertujuan meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat berbasis Rukun Tetangga (RT). Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat diberikan ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam menentukan kebutuhan pembangunan di lingkungannya, baik dalam bidang infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, maupun kepemudaan. Program ini juga diharapkan mampu mewujudkan kemandirian masyarakat melalui penguatan kapasitas dan pemberdayaan sumber daya lokal.

Meskipun demikian, implementasi suatu kebijakan publik sering kali menghadapi berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, khususnya pada wilayah koordinasi Pokmas II, masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasi Program Probeyaya. Permasalahan yang muncul antara lain belum optimalnya komunikasi antara pihak kelurahan, kelompok masyarakat (Pokmas), dan masyarakat penerima manfaat. Selain itu, masih terdapat keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan, keterbatasan waktu pelaksanaan administrasi program, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan tujuan Program Probeyaya. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian tujuan kebijakan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan Program Probeyaya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III. Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Secara teoritis, implementasi kebijakan merupakan proses penerjemahan keputusan atau kebijakan publik ke dalam tindakan nyata yang dilakukan oleh berbagai aktor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Grindle, implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menyangkut distribusi manfaat serta interaksi antaraktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Sementara itu, Edward III menekankan bahwa komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana yang baik, dan struktur birokrasi yang jelas merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, teori implementasi Edward III dinilai relevan untuk menganalisis pelaksanaan Program Probebaya di Kelurahan Teluk Lerong Ulu.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, kualitas koordinasi antarinstansi, serta kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan program. Namun demikian, karakteristik sosial dan kondisi lingkungan yang berbeda pada setiap wilayah menyebabkan hasil implementasi kebijakan dapat bervariasi. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi Program Probebaya di Kelurahan Teluk Lerong Ulu menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut pada tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, khususnya pada wilayah koordinasi Pokmas II. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut berdasarkan perspektif model implementasi Edward III.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Samarinda, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, serta kelompok masyarakat pelaksana Probebaya dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan

## **Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda**

program sehingga tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

### **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena implementasi kebijakan publik berdasarkan pengalaman, persepsi, dan interaksi para pelaksana maupun masyarakat yang terlibat. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai kerangka analisis.

Lokasi penelitian berada di wilayah Pokmas II Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda yang meliputi RT 10, RT 11, RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, RT 25, dan RT 26. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan kunci yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Probebaya, serta accidental sampling untuk memperoleh informasi tambahan dari masyarakat yang ditemui secara langsung dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Informan penelitian terdiri atas aparat kelurahan, pengurus Pokmas, ketua RT, tokoh masyarakat, serta warga yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan Probebaya di lapangan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung, dan faktor penghambat implementasi program. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui berbagai dokumen resmi, laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, foto kegiatan, serta arsip yang berkaitan dengan Program Probebaya. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang didukung dengan pedoman wawancara, catatan lapangan, alat perekam, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar-temuan penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian untuk memastikan keabsahan dan konsistensi temuan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan pengecekan ulang informasi kepada informan sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### 3. HASIL

#### 3.1 Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (*Probebaya*) di Kelurahan Teluk Lerong Ulu

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (*Probebaya*) di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Analisis implementasi menggunakan model Edward III yang terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

##### 3.1.1 Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan tingkat pemahaman pelaksana dan masyarakat terhadap program yang dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dalam pelaksanaan *Probebaya* dilakukan melalui sosialisasi berjenjang dari Pemerintah Kota Samarinda kepada kecamatan, kelurahan, Pokmas, RT, hingga masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan memberikan pemahaman mengenai mekanisme pengusulan program, pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, koordinasi antar pelaksana program juga dilakukan melalui rapat dan musyawarah warga sehingga informasi dapat tersampaikan kepada masyarakat.

Tabel 1. Implementasi Komunikasi dalam Program *Probebaya*

No	Indikator	Temuan Penelitian
1	Sosialisasi Program	Dilaksanakan secara berjenjang dari pemerintah kota hingga masyarakat
2	Penyampaian Informasi	Informasi program disampaikan melalui rapat dan musyawarah warga

3	Koordinasi	Terdapat koordinasi antara kelurahan, Pokmas, dan RT
4	Pemahaman Masyarakat	Sebagian masyarakat telah memahami tujuan program
5	Lingkungan Alami	Menjadi daya tarik bagi wisatawan yang menyukai wisata alam

### 3.1.2 Sumber Daya (*Resources*)

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan *Probebaya* telah memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan pemerintah.

Selain sumber daya manusia, dukungan anggaran yang tersedia melalui program *Probebaya* menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ketersediaan sarana pendukung administrasi juga membantu pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

**Tabel 2. Implementasi Sumber Daya dalam Program *Probebaya***

No	Komponen Sumber Daya	Temuan Penelitian
1	Sumber Daya Manusia	Pengurus memiliki kemampuan administratif yang memadai
2	Anggaran	Dana program tersedia sesuai mekanisme yang ditetapkan
3	Sarana Pendukung	Tersedia fasilitas administrasi dan pelaporan
4	Kompetensi Pelaksana	Cukup mendukung pelaksanaan program

### 3.1.3 Disposisi (*Disposition*)

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, para pelaksana program menunjukkan komitmen yang baik terhadap pelaksanaan *Probebaya*. Mereka berupaya melaksanakan program sesuai ketentuan yang berlaku dan mendukung tercapainya tujuan program.

Meskipun demikian, partisipasi beberapa unsur kelembagaan masyarakat masih belum optimal sehingga memerlukan peningkatan koordinasi dan keterlibatan dalam setiap tahapan program.

**Tabel 3. Implementasi Disposisi dalam Program *Probebaya***

No	Indikator	Temuan Penelitian
1	Komitmen Pelaksana	Tinggi dalam menjalankan program
2	Kepatuhan terhadap Aturan	Dilaksanakan sesuai pedoman teknis
3	Tanggung Jawab	Pelaksana aktif dalam pelaksanaan kegiatan
4	Partisipasi Lembaga Masyarakat	Masih perlu ditingkatkan

### 3.1.4 Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi berperan dalam mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab antar pelaksana program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana *Probebaya* telah memiliki pembagian tugas yang jelas.

Keberadaan standar operasional dan pedoman pelaksanaan memudahkan koordinasi antar pihak yang terlibat sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai prosedur.

**Tabel 4. Implementasi Struktur Birokrasi dalam Program *Probebaya***

No	Indikator	Temuan Penelitian
1	Pembagian Tugas	Telah ditetapkan secara jelas
2	Koordinasi Organisasi	Berjalan sesuai mekanisme
3	Pedoman Kerja	Tersedia pedoman teknis pelaksanaan
4	Pengambilan Keputusan	Dilaksanakan melalui koordinasi bersama

## 3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program *Probebaya*

### 3.2.1 Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang *Probebaya*. Faktor tersebut meliputi dukungan pemerintah daerah, tersedianya anggaran program, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

**Tabel 5. Faktor Pendukung Implementasi Program *Probebaya***

No	Faktor Pendukung	Deskripsi
1	Dukungan Pemerintah	Adanya dukungan dari OPD terkait
2	Anggaran Program	Dana tersedia untuk mendukung kegiatan
3	Partisipasi Masyarakat	Masyarakat terlibat dalam musyawarah dan pelaksanaan
4	Koordinasi Antar Pelaksana	Mempermudah pelaksanaan program

### **3.2.2 Faktor Penghambat**

Selain faktor pendukung, penelitian juga menemukan beberapa faktor penghambat dalam implementasi program *Probebaya*. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan komunikasi, kemampuan administrasi pelaksana yang belum merata, keterbatasan waktu penyusunan laporan, dan belum terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat akibat keterbatasan anggaran.

**Tabel 6. Faktor Penghambat Implementasi Program *Probebaya***

<b>No</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Deskripsi</b>
1	Komunikasi	Informasi belum tersampaikan secara merata
2	Kapasitas SDM	Kemampuan penyusunan laporan masih beragam
3	Waktu Pelaporan	Waktu penyelesaian laporan relatif terbatas
4	Keterbatasan Anggaran	Belum mampu memenuhi seluruh usulan masyarakat

## **4. PEMBAHASAN**

Pembahasan penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yang terdiri atas empat indikator utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat indikator tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (*Probebaya*) di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

### **4.1 Komunikasi (*Communication*)**

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan tingkat pemahaman pelaksana maupun masyarakat terhadap tujuan dan mekanisme program. Edward III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dalam implementasi Program *Probebaya* di Kelurahan Teluk Lerong Ulu telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda, kecamatan, kelurahan, hingga pengurus Pokmas dan ketua RT. Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai prosedur pelaksanaan program, mekanisme pengusulan kegiatan, serta tata cara pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah mengetahui keberadaan Program *Probebaya* dan manfaat yang diperoleh dari program tersebut. Hal ini

menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi telah berjalan cukup baik. Namun demikian, masih ditemukan beberapa masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh mengenai mekanisme pelaksanaan program dan penggunaan anggaran yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi belum sepenuhnya optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Edward III yang menegaskan bahwa komunikasi yang efektif dapat mengurangi terjadinya distorsi informasi dan kesalahpahaman dalam implementasi kebijakan. Temuan ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai kelompok sasaran.

#### **4.2 Sumber Daya (*Resources*)**

Menurut Edward III, implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif tanpa didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, fasilitas, dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Probebaya di Kelurahan Teluk Lerong Ulu telah memperoleh dukungan sumber daya yang cukup baik. Dari aspek sumber daya manusia, pengurus Pokmas dan pelaksana program memiliki kemampuan dasar dalam menjalankan tugas administrasi dan pengelolaan kegiatan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan pendampingan teknis kepada pengurus dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.

Dari aspek finansial, Pemerintah Kota Samarinda telah menyediakan alokasi anggaran yang cukup besar untuk mendukung pelaksanaan Probebaya. Ketersediaan anggaran tersebut memungkinkan berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat di tingkat RT.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa masih terdapat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia terutama dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dan administrasi keuangan. Beberapa pengurus Pokmas masih mengalami kesulitan dalam memahami sistem pelaporan yang berlaku sehingga memerlukan pendampingan lebih lanjut.

Temuan ini memperkuat teori Edward III bahwa kecukupan sumber daya menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan sumber daya finansial yang memadai, tujuan kebijakan sulit dicapai secara optimal.

#### **4.3 Disposisi (*Disposition*)**

## **Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda**

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor yang berkaitan dengan komitmen, integritas, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila pelaksana memiliki sikap positif terhadap kebijakan yang dilaksanakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus Pokmas, ketua RT, serta aparat kelurahan memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan Program Probebaya. Hal ini terlihat dari upaya mereka dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun usulan kegiatan, serta mengawasi pelaksanaan program di lingkungan masing-masing.

Komitmen pelaksana tersebut memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program karena berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dapat terlaksana sesuai rencana yang telah disepakati bersama. Sikap terbuka dan partisipatif yang ditunjukkan oleh para pelaksana juga mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa keterlibatan beberapa unsur masyarakat dan lembaga kemasyarakatan masih belum maksimal. Kurangnya partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan musyawarah dan evaluasi program menunjukkan bahwa disposisi positif belum sepenuhnya dimiliki oleh seluruh pihak yang terlibat.

Temuan ini sesuai dengan teori Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada aturan dan sumber daya, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan.

### **4.4 Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)**

Struktur birokrasi merupakan aspek yang berkaitan dengan pembagian tugas, wewenang, prosedur kerja, serta mekanisme koordinasi antarorganisasi dalam implementasi kebijakan. Edward III menjelaskan bahwa struktur birokrasi yang jelas dan sederhana akan mempermudah pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Probebaya di Kelurahan Teluk Lerong Ulu telah memiliki struktur organisasi yang relatif jelas. Setiap pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, Pokmas, hingga RT memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan dalam pedoman pelaksanaan program.

Adanya standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis pelaksanaan turut membantu pelaksana dalam menjalankan program sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaksana di tingkat kelurahan juga berjalan cukup baik sehingga berbagai kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, masih ditemukan kendala birokrasi berupa proses administrasi dan pelaporan yang dianggap cukup kompleks oleh sebagian pengurus Pokmas. Prosedur yang panjang terkadang menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Temuan ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi Program Probebaya telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan penyederhanaan prosedur administrasi agar pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

#### **4.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Probebaya**

##### **4.5.1 Faktor Pendukung**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Program Probebaya di Kelurahan Teluk Lerong Ulu. Pertama, adanya dukungan penuh dari Pemerintah Kota Samarinda melalui penyediaan anggaran dan regulasi yang jelas. Kedua, adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui musyawarah tingkat RT. Ketiga, koordinasi yang cukup baik antara pemerintah daerah, kelurahan, Pokmas, dan masyarakat dalam pelaksanaan program.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

##### **4.5.2 Faktor Penghambat**

Di sisi lain, penelitian juga menemukan beberapa faktor penghambat implementasi Program Probebaya. Hambatan tersebut meliputi masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan, kurang optimalnya komunikasi kepada seluruh masyarakat, keterbatasan waktu dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta belum terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat akibat keterbatasan anggaran yang tersedia.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi Program Probebaya telah berjalan cukup baik, masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana, penguatan komunikasi publik, dan penyederhanaan prosedur administrasi agar tujuan program dapat tercapai secara lebih optimal.

## **5. SIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, khususnya pada wilayah Pokmas II.

## **Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PROBEBAYA telah berjalan cukup baik. Dari aspek komunikasi, proses sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat telah dilakukan melalui berbagai tahapan koordinasi antara pemerintah daerah, kelurahan, pengurus Pokmas, dan masyarakat. Dari aspek sumber daya, ketersediaan sumber daya manusia dan dukungan anggaran dinilai cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan program. Pada aspek disposisi, para pelaksana menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang baik dalam menjalankan program. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, pembagian tugas dan mekanisme kerja telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan program.

Penelitian ini juga menemukan beberapa faktor pendukung implementasi kebijakan, yaitu adanya dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tersedianya sumber pendanaan program, serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui rembuk warga. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas implementasi program, antara lain komunikasi yang belum optimal antara pemangku kepentingan, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam penyusunan administrasi dan pelaporan, keterbatasan waktu dalam penyelesaian laporan kegiatan, serta keterbatasan anggaran yang belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Pemerintah Kota Samarinda dan pihak terkait terus meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi antaraktor pelaksana program, memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis administrasi dan pengelolaan program, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan PROBEBAYA. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas program PROBEBAYA pada wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun mixed methods untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Amrizal, D. (2019). *Metode penelitian pendidikan*. Rajawali Pers.
- Hardani, A. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu Grup.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan publik: Berbasis dynamic policy analysis* (Edisi revisi ke-2). Gava Media.
- Kartawidjaja, H. A. D. (2018). *Kebijakan publik: Analisis implementasi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)*. Alfabeta.

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, D. (2015). *Metodologi penelitian pendidikan*. Rajawali Pers.
- Nasution. (2015). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Tarsito.
- Nasution. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Bumi Aksara.
- Nugroho, R. (2017). *Kebijakan publik: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Pasolong, H. (2016). *Metode penelitian administrasi publik*. Alfabeta.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan kebijakan publik*. Unisri Press.
- Sujana. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2017). *Metode penelitian pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Widodo, J. (2022). *Analisis kebijakan publik*. Media Nusa Creative.
- Hayat. (2018). *Kebijakan publik: Evaluasi, reformasi, dan formulasi*. Intrans Publishing.
- Arikunto, S. (2015). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.

## **Jurnal**

- Hariyana, L., Tarmiji, M. R., & Pabelle, E. (2024). Implementasi Program Probebaya terhadap Pembangunan di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *MES Management Journal*, 3(2), 442–451. <https://doi.org/10.56709/mesman.v3i2.317>
- Yani, A., Eryani, T. W. R. ., Salmon, G. A., & Wendy, M. (2024). Study of the Implementation of Samarinda Mayor Regulation Number 4 of 2023 in the Kelurahan Tenun Area of Samarinda City . *Golden Ratio of Data in Summary*, 4(2), 312–321. <https://doi.org/10.52970/grdis.v4i2.522>

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

**Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda**

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat.*

*Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 119 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.*

*Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021–2026.*

*Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya).*

*Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya).*

*Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya).*

*Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya).*